

KAJIAN KRIMINOLOGI KEKERASAN SEKSUAL OLEH TOKOH AGAMA TERHADAP KASUS ANAK

Oleh Dinda Adhani*, Dani Krisnawati **

INTISARI

Kekerasan seksual merupakan kejahatan luar biasa yang bisa dilakukan oleh siapa, dimana, dan kapan saja. Dalam kurun waktu 5 tahun, terdapat peningkatan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh tokoh agama kepada anak di Indonesia. Kasus kekerasan seksual kepada anak ini marak terjadi di lembaga pendidikan berbasis agama dan cenderung meresahkan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji fenomena kejahatan dengan mengidentifikasi faktor penyebab dan modus kejahatan dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh tokoh agama terhadap anak melalui pendekatan kriminologi. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada tokoh agama yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan analisis adalah metode penelitian normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan dan wawancara. Penulis melakukan wawancara kepada narasumber yaitu hakim dan akademisi untuk mendukung penelitian. Data disajikan secara kualitatif menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kuasa dan kekuasaan besar menjadi faktor utama tokoh agama melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Modus yang dilakukan pelaku didominasi dengan adanya intimidasi yang diberikan kepada para anak korban. Selain itu, penulis menemukan bahwa hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana menggunakan prinsip independensi sehingga setiap kasus memiliki dasar pertimbangan masing-masing. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi pencegahan dan alternatif penyelesaian pada kasus kekerasan seksual yang dilakukan tokoh agama terhadap anak.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Tokoh Agama, Pondok Pesantren, Anak, Kriminologi

* Mahasiswa Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

** Dosen Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

SEXUAL VIOLENCE TO CHILDREN BY RELIGIOUS LEADERS: STUDY FROM CRIMINOLOGIES PERSPECTIVE

By Dinda Adhani*, Dani Krisnawati**

ABSTRACT

Sexual violence is the most serious crime that can be conducted by anyone, everyone and anytime. In span of 5 years, there is an increase of sexual violence case conducted by religious leader group to children in Indonesia. Sexual violence case to child often occurred in Islamic boarding house institution and disturb the society.

Based on the aforementioned facts, the research intend to understand and study the sexual violence crime by identifying factors and scheme in sexual violence crime conducted by religious leader group using criminology perspective. In addition, the research intend to analyse judge rationalities in giving criminal sanctions to religious leader group who commit sexual violence to children.

The research method used by the author in carrying out the analysis is a normative research method. Using literature study as legal material, the author also conducted interviews with judges and academicians, to support the research. Thus, the data is presented qualitatively using descriptive analysis.

The results of the research show that power relations and position in institutions are the biggest factors from religious leader group to conduct sexual violence to children. The method used by the perpetrator was dominated by intimidation given to victims. In addition, the author found that judges use the principle of independency in imposing which results in different outcome and considerations from each cases. This research also provides recommendations for prevention and alternative solutions to cases of sexual violence committed by religious figures against children.

Keywords: Sexual Harassment, Leader of Religious Group, Islamic Boarding House, Children, Criminology

* Undergraduate Student of Criminal Law Department, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

** Lecturer at Criminal Law Department, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.